

**PERLUASAN MAKNA PASAL 41 UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN TENTANG PENGASUHAN ANAK
PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN
KEADILAN HAK ASASI ANAK**

DISERTASI

Oleh :

**Fitrian Noor
NIM: 170311020014**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
2024**

**PERLUASAN MAKNA PASAL 41 UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN TENTANG PENGASUHAN ANAK
PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN
KEADILAN HAK ASASI ANAK**

DISERTASI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Doktor (S3)
Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**Fitrian Noor
NIM: 170311020014**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriah Noor
NIM : 170311020017
Tempat/Tgl Lahir : Banjarmasin, 09 Agustus 1980
Program Studi : S3 Ilmu Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi saya yang berjudul “Perluasan Makna Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tentang Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Keadilan Hak Asasi Anak” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Disertasi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil palgiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Fitriah Noor

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

H. Fitriani Noor
NIM: 170311020014

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Fahmi al-Amruzi, M.Hum
Tanggal, 20 Mei 2024

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum.
Tanggal, 20 Mei 2024

PENGESAHAN DISERTASI


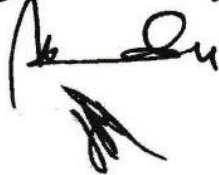





PERLUASAN MAKNA PASAL 41 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN KEADILAN HAK ASASI ANAK

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

Fitrian Noor
NIM: 170311020014

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024
dinyatakan LULUS dengan predikat SANGAT MEMUASKAN

Dewan Penguji

Nama	Tanda tangan
1. Prof. H. Zulfa Zamalie, M.Pd., Ph.D. (Ketua Penguji)	
2. Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag, MH. (Penguji Utama)	
3. Lena Hanifah, SH. LL.M, Ph.D. (Penguji Eksternal)	
4. Prof. Dr. H. M. Fahmi al-Amruzi, M.Hum. (Penguji)	
5. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum. (Penguji)	
6. Mujiburohman, M.A., Ph.D. (Penguji)	
7. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M. A. (Sekretaris/Penguji)	



Mengetahui,
Direktur


Prof. H. Zulfa Zamalie, M.Pd., Ph.D.
NIP.197105251997031006

ABSTRAK

Fitrian Noor, NIM. 170311020017, *Perluasan Makna Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tentang Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Keadilan Hak Asasi Anak*, di bawah Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum., dan Pembimbing II: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum., Disertasi, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin 2024.

Kata kunci: Pengasuhan Anak, Perceraian, Hak Asasi Anak

Tulisan ini dilatarbelakangi dari pelaksanaan putusan pengadilan terhadap hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia yang berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan hakim memutus perkara hak asuh anak ikut ibu atau bapaknya (pengasuhan terpisah), akibatnya anak sulit bertemu dengan orang tua yang kalah (dihang-halangi oleh pihak yang menang), hal ini sangat merugikan bagi hak asasi anak untuk diasuh, dididik dan tumbuh berkembang sesuai fitrahnya oleh kedua orang tuanya.

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori yaitu: *grand theory* memakai teori maqasid syariah (tujuan hukum), *middle theory* menggunakan teori perlindungan hukum, *applied theory* menggunakan teori keadilan, teori *biological justice*, teori perubahan hukum dan teori istihsan (masalah).

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji konsep hadhanah di Indonesia pasca perceraian apakah sesuai dengan hak asasi anak, untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum atas hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya, dan untuk mengkaji perluasan makna pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tentang pengasuhan anak pasca perceraian demi kepentingan terbaik bagi anak. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dari hasil penelitian ditemukan berbagai macam masalah sosial akibat bunyi pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan hakim memutus anak ikut ibu atau bapaknya (pengasuhan terpisah) yang sangat merugikan bagi hak asasi anak. Seperti perebutan hak asuh anak, susahnyalah satu orang tua untuk menemui anaknya, bahkan seringnya terjadi kasus penculikan anak sesuai dengan data yang ada di KPAI, belum lagi putusan hak asuh anak sulit untuk dieksekusi karena anak sering tidak berada ditempat (objek eksekusi dilarikan). Begitu pula menurut berbagai macam penelitian dan literatur banyak dampak negatif psikologi anak yang diasuh hanya oleh salah satu orang tuanya saja (pengasuhan terpisah).

Dari hasil analisis peneliti berkesimpulan hak-hak anak sangat penting untuk dilindungi, negara wajib hadir untuk memastikan anak memperoleh hak asasinya sebagai bagian dari masyarakat. Maka berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest child's*) dan prinsip kesejahteraan anak sebagai dasar tertinggi (*child welfare as paramount consideration*) pengaturan hak asuh anak pasca perceraian dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan sangat perlu diperluas maknanya yang semula Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah “bapak atau ibu” berkewajiban memelihara, diperluas maknanya menjadi “bapak dan atau ibu”, sehingga Hakim lebih leluasa dalam memutus sengketa hak asuh anak pasca perceraian dapat diasuh bersama-sama oleh kedua orang tuanya. Hak asuh bersama ini telah diterapkan diberbagai negara common law seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Spanyol.

ABSTRACT

Fitrian Noor, NIM. 170311020017, The Expansion of the Meaning of Article 41 of the Marriage Law on Child Custody After Divorce Based on the Justice of Children's Human Rights, under the supervision of: Advisor I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum., and Advisor II: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum., Dissertation, Postgraduate Program at UIN Antasari Banjarmasin 2024.

Keywords: Child Custody, Divorce, Children's Human Rights

This writing is prompted by the implementation of court decisions on post-divorce child custody in Indonesia, based on Article 41 of the Marriage Law, which requires judges to decide child custody cases to follow either the mother or father (separate custody), resulting in children finding it difficult to meet the losing parent (prevented by the winning party). This is highly detrimental to the child's fundamental rights to be nurtured, educated, and grow according to their natural disposition by both parents.

To address the research issue, the author employs several theories: a grand theory utilizing the maqasid Sharia theory (purpose of law), a middle theory employing legal protection theory, an applied theory using justice theory, biological justice theory, legal change theory, and istihsan theory (public interest).

The aim of this research is to examine whether the concept of custody in Indonesia post-divorce aligns with children's rights, to understand and assess the legal protection of children's rights post-divorce from both parents, and to explore expanding the meaning of Article 41 of the Marriage Law regarding post-divorce child custody for the best interests of the child. The research methodology employed is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach.

From the research results, various social problems are found due to the provision of Article 41 of the Marriage Law, which mandates judges to decide custody either with the mother or father (separate custody), greatly harming the child's fundamental rights. These include custody disputes, difficulty for one parent to see their child, and frequent cases of child abduction according to data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI). Moreover, executing custody decisions becomes challenging as children are often not present (they are taken away). Additionally, various studies and literature indicate many negative psychological impacts on children raised by only one parent (separate custody). From the researcher's analysis, it is concluded that children's rights are highly important to be protected, and the state is obliged to ensure that children obtain their fundamental rights as members of society. Therefore, based on the principle of the best interest of the child and the principle of child welfare as the highest consideration, the regulation of post-divorce child custody in Article 41 of the Marriage Law needs to be expanded in meaning. Originally, due to divorce, the obligation to maintain fell on either the father or mother; this should be expanded to include both parents, allowing judges more flexibility in deciding post-divorce custody disputes so that children can be jointly raised by both parents. Joint custody has been implemented in various common law countries such as the United States, Canada, and Spain.

مستخلص البحث

فطري النور، رقم قيد الطالب. 170311020017: "التوسع في معنى المادة رقم 41 من قانون الزواج بشأن حضانة الأبناء بعد الطلاق على أساس العدالة وحقوق الأبناء"، المشرف الأول: الأستاذ الدكتور الحاج. فهمي الأمرزي، الماجستير. المشرف الثاني: الأستاذ الدكتور الحاج. أحمددي حسن، الماجستير. رسالة الدكتوراة. الدراسات العليا جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين، 2024.

الكلمات المفتاحية : حضانة الأبناء، الطلاق، حقوق الأبناء بعد الطلاق

ترجع خلفية هذا البحث إلى تنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بشأن حضانة ورعاية الأبناء بعد الطلاق في إندونيسيا والتي تستند إلى المادة رقم 41 من قانون الزواج التي تتطلب من القضاة البت في قضايا حضانة الأبناء ورعايتهم مع أحد الوالدين (أي الأبوة والأمومة المنفصلة)، نتيجة لذلك يصعب على الأبناء مقابلة أحدهما الآخر (حيث عادة ما يعرقلها الطرف الفائز بالحضانة عن الخاسر)، وهذا يضر جداً بحقوق الأبناء الإنسانية. وذلك في أن يحظى بالرعاية والتعليم والنمو وفقاً لطبيعته أي من قبل كلا والديه.

وللإجابة على المشكلة المذكورة أعلاه، استخدم الباحث في هذا البحث عدة نظريات وهي: النظرية الكبرى *Grand Theory* باستخدام نظرية مقاصد الشريعة (الغرض القانوني)، النظرية الوسطى *Middle Theory* باستخدام نظرية الحماية القانونية، النظرية التطبيقية *Applied Theory* باستخدام نظرية العدالة، نظرية العدالة البيولوجية، نظرية التغيير القانوني ونظرية الاستحسان (المصلحة).

الغرض من هذا البحث هو دراسة مفهوم الحضانة بعد الطلاق في إندونيسيا، وما إذا كان يتوافق مع حقوق الأبناء، ولمعرفة ودراسة الحماية القانونية لحقوق الأبناء بعد طلاق والديه، ودراسة التوسع لمعنى المادة رقم 41 من قانون الزواج فيما يتعلق بحضانة ورعاية الأبناء بعد الطلاق بما يحقق المصلحة المثلى لهم. ونوع البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث القانوني المعياري ذو المنهج القانوني (*Statute Approach*) والمنهج المفاهيمي (*Conceptual Approach*).

ومن نتائج البحث، تبين أن هناك العديد من المشاكل الاجتماعية نتيجة للمادة رقم 41 من قانون الزواج التي تقتضي من القضاة البت في أن يتبع الأبناء أحد الوالدين (الأبوة والأمومة المنفصلة) مما يضر جداً بحقوق الأبناء الإنسانية. مثل الصراع على حضانة الأبناء، صعوبة مقابلة الأبناء من قبل أحد الوالدين، بل هناك حالات متكررة لاختطاف الأبناء حسب البيانات الواردة في لجنة حماية الأطفال الإندونيسية *KPAI*، ناهيك عن صعوبة تنفيذ قرارات حضانة الأبناء لعدم تواجدهم في قاعات المحاكم غالباً (حيث يتم التعجيل بموضوع التنفيذ دون الأخذ بأرائهم ومراعاة مشاعرهم). وبالمثل، وفقاً لمختلف أنواع الأبحاث والدراسات، فإن هناك العديد من التأثيرات النفسية السلبية على الأبناء الذين يتولى رعايتهم أحد الوالدين فقط (حضانة منفصلة).

ومن نتائج تحليل البيانات في هذا البحث، توصل الباحث إلى أن حقوق الأبناء مهمة جداً لا بد من حمايتها، ويجب أن تكون الدولة حاضرة لضمان حصول الأبناء على حقوقهم الإنسانية كجزء من المجتمع. لذا، وانطلاقاً من مبدأ المصلحة المثلى للأبناء (*The Best Interest Child's*) ومبدأ رعاية الأبناء كاعتبار أساسي (*Child Welfare As Paramount Consideration*)، فإن تنظيم حضانة الأبناء بعد الطلاق في المادة رقم 41 من قانون الزواج يحتاج حقاً إلى التوسع عن معناه السابق. وهو أنه نتيجة لتفكك الزواج بسبب الطلاق، فإن "الأب أو الأم" ملزم برعاية الأبناء، وتوسيعه إلى أن "الأب و/أو الأم"، بحيث يكون القاضي يتمتع بمرونة أكثر وبمزيد من الحرية في البت وإصدار القرارات حول نزاعات الحضانة،

ويمكن رعاية الأبناء بعد الطلاق بشكل مشترك من قبل كلا الوالدين. وقد تم تطبيق حق الحضانة المشتركة هذا في العديد من دول القانون العام (*common law*) مثل الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul “Perluasan Makna Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tentang Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Keadilan Hak Asasi Anak”.

Tujuan penulisan disertasi ini adalah untuk diajukan kepada Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Doctor (S3) program studi Ilmu Syari’ah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini masih banyak terdapat kekurangan, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu pengetahuan serta pengalaman Penulis. Oleh karena itu perkenankanlah Penulis menghaturkan permohonan maaf atas segala kekurangan tersebut dan mohon koreksi yang bersifat membangun serta masukan guna perbaikan dan penyempurnaan karya tulis ini.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.
2. Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D., selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin atas persetujuan yang diberikan kepada penulis.
3. Mujiburohman, MA., Ph.D. dan Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc, MA., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan bimbingan

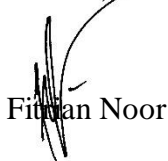
dan pengarahan kepada penulis dalam perkuliahan.

4. Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum., selaku pembimbing I dan Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam rangka penulisan disertasi ini sehingga penulis mendapatkan kemudahan.
5. Para Dosen S3 Program Studi Ilmu Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Ayahnda Drs. H. Tadjuddin Noor, SH, MH., dan Ibunda Hj. Lathifah, A.Ma. yang penuh dengan kasih sayang mendidik dan memberikan motivasi serta dorongan untuk keberhasilan penulis baik dalam hidup maupun dalam akademis.
7. Isteri tercinta Kiki Miranti, S.Pd, M.Pd., anak-anak Penulis Muhammad Ahsanul Fitri, Ahmad Zaidul Ihsan, Yazid Zidan dan Muhammad Afnan Rasyid, yang dengan penuh kasih sayang selalu memotivasi penulis dalam kelancaram hidup dan akademis.
8. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu hingga selesai penulisan disertasi ini.

Dan akhirnya penulis berharap, agar kiranya karya tulis ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak dan menjadi wakaf akademik bagi kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Penulis,



Fittan Noor

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	tsha'	Ts	te dan es
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H	ha kecil
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	Sh	es dan ha
ض	dad	Dh	de dan ha
ط	tha'	Tha	te dan ha
ظ	zha'	Zh	zet dan ha
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	Gh	Ge dan ha
ف	fa'	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
هـ	ha'	H	ha besar
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-quddūs</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	a
ـِ	Kasrah	Ditulis	i
ـُ	Dammah	Ditulis	u
شكر	Fathah	Ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	qurī'a

ينطق	Dammah	Ditulis	yanthiqu
------	--------	---------	----------

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	Ditulis	Ā
	كاملة	Ditulis	kāmilah
2	fathah + ya mati	Ditulis	Ā
	صلى	Ditulis	shallā
3	kasrah + ya mati	Ditulis	Ī
	شديد	Ditulis	syadīd
4	dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	صدر	Ditulis	shudūr

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya mati	Ditulis	Ai
	رويد	Ditulis	ruwaidun
2	fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	وفرعون ذي الأوتاد	Ditulis	wa fir'auna dzī al-autād

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	Ditulis	a'antum asyaddu khalqan
---------------	---------	-------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	Al-Qur'an
الكتاب	Ditulis	Al-kitab

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan di-idgamkan

الصبح	Ditulis	ash-shubhu
الساهرة	Ditulis	as-sāhirah

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Idza asy-syamsu</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	10
D. Definisi Operasional	11
E. Penelitian Terdahulu.....	18
F. Kajian Teori	21
G. Metode Penelitian.....	69
H. Sistematika Penulisan.....	79
BAB II : KONSEP KEADILAN HAK ASASI ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA DAN KONSEP PENGASUHAN ANAK DI BERBAGAI NEGARA	
A. Konsep Kewajiban dan Peran Orang Tua Terhadap Anak ...	80
B. Konsep Perceraian dan Akibat Hukumnya.....	94
C. Konsep Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Indoenasia.....	99
D. Pemeliharaan Anak dalam Putusan Pengadilan Agama.....	113
E. Pengasuhan Anak di Beberapa Negara.....	125
BAB III : KEADILAN HAK ASASI ANAK PASCA PERCERAIAN KEDUA ORANG TUANYA DI INDONESIA	
A. Perlindungan Hak Asasi Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya.....	174
B. Problematika Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya Secara Teoritis dan Praktis	220

BAB IV	: KONSEP PERLUASAN MAKNA PASAL 41 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA	
	A. Analisis Tawaran Konsep Hak Asuh Bersama Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak	233
	B. Perluasan makna kata pada pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Sebagai Wujud Perlindungan Negara Terhadap Hak Asasi Anak.....	266
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	278
	B. Saran.....	279
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
SERTIFIKAT PLAGIASI		

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Banjarmasin Tahun 2017 s.d. 2021.....	114
TABEL 2 : Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2017 s.d. 2021.....	115
TABEL 3 : Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Martapura Tahun 2017 s.d. 2021.....	116
TABEL 4 : Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Rantau Tahun 2017 s.d. 2021.....	116
TABEL 5 : Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2017 s.d. 2021.....	117
TABEL 6 : Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Negara Tahun 2017 s.d. 2021.....	118
TABEL 7 : Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Barabai Tahun 2017 s.d. 2021.....	118
TABEL 8 : Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2017 s.d. 2021.....	119
TABEL 9 : Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Tanjung Tahun 2017 s.d. 2021.....	120
TABEL 10 : Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Marabahan Tahun 2017 s.d. 2021.....	121
TABEL 11 : Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2017 s.d. 2021.....	121
TABEL 12 : Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2017 s.d. 2021.....	122
TABEL 13 : Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Kotabaru Tahun 2017 s.d. 2021.....	123
TABEL 14 : Grafik Jumlah Perkara Hak Asuh Anak di Kalimantan Selatan..	123